



WARTA MINERBA

Majalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan

Nilai Tambah



Pemanfaatan Batubara
sebagai Energi Alternatif



Neraca Sumberdaya & Cadangan Mineral
sebagai Database Pertambangan

Pengantar Redaksi	Tambang untuk Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat	3
Artikel Utama	Menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan	4
	Menentukan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang	12
Artikel Minerba	Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral sebagai Database Pertambangan	14
	Pemanfaatan Batubara sebagai Energi Alternatif	17
	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara "Bersama untuk Berbagi"	18
	Peningkatan Peran Sub Sektor Mineral dan Batubara Dalam Mendukung Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	19
Info Minerba	PT Adaro Indonesia Sustainability dengan Sinergi Profit, People and Planet	20
	Koordinasi Pelaksanaan Permen 7/2012	28
	Keikutsertaan Pameran Jambi Emas Expo 2012	29
	Keikutsertaan Pameran KALTIM FAIR 2012	30
Si Mino	Antara Tambang dan Perkebunan Sama-sama Penting!	31

**Cover Story:**

Bola dalam cover ini mewakili dunia pertambangan dan mineral di Indonesia. Dengan berlakunya UU Minerba (UU No 4 tahun 2011), Indonesia bertekad meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ini adalah sebuah tujuan bersama yang tentu perlu dukungan semua pihak. Layaknya sebuah permainan bola, tujuan yang jelas akan membuat seluruh anggota tim memiliki daya juang maksimal untuk meraih gol. Semoga dunia pertambangan dan mineral Indonesia semakin gemilang dengan mewujudkan nilai tambah di dalam negeri.

Redaksi menerima tulisan dari dalam maupun luar lingkungan Ditjen Minerba. Silahkan kirim artikel Anda berikut identitas diri dan foto ke alamat redaksi.

Diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Penasehat
Dr. Ir. Thamrin Sihite

Penanggung Jawab
Ir. Harya Adityawarman

Koordinator Redaktur
Ir. Sujatmiko
Fadli Ibrahim, SH
Chaerul A.Djalil, S.Sos

Editor
Drs. Tri Priyono, MT
Helmi Nurmalaiki, SH
Drs. Rokhmadin
Rina Handayani, ST
Irfan. K, ST

Redaktur Pelaksana
Yanna Hendro Kuncoro, ST
Dra. Samsia Gustina, Msi
Benny Hariyadi, ST

Penulis Artikel
Benny Hariyadi, ST.
Mohammad Anis, ST. MM.
Rina Handayani, ST.
Satyo Naresworo, S.IP.
T. Budi Mantoro

Fotografer
Suhadi
Satyo Naresworo, S.IP

Sekretariat
Nurmala Parhusip, B.Sc
Sri Kusriani
Iko Desy Anggareni, SH
Wawan Supriawan, SH
Ir. Hildah, MM
Salman Akira Togi, SM

Desain & Layout
Irfan K. ST

Alamat Redaksi
Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10 - Jakarta 12870
Telp: +62-21 8295608
Fax: +62-21 8315209, 8353361

Website
www.djmbp.esdm.go.id

E-mail:
wartampb@djmbp.esdm.go.id

Tambang untuk Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat

Pembaca Warta Minerba yang budiman,

Pada awal 2012 ini kami mengangkat artikel mengenai batubara yang kian meningkat produksinya tetapi masih berorientasi ekspor. Padahal, batubara adalah komoditas energi yang sangat strategis untuk Indonesia. Bahkan, digadang-gadang akan menggeser peran dominan minyak bumi pada 2025.

Untuk itu perlu perubahan menyeluruh dan terintegrasi. Mulai dari aspek penghitungan cadangan, metode penambangan yang tepat, memenuhi kaidah *good mining practice*, hingga optimalisasi batubara dengan berbagai diversifikasi penggunaan batubara. Koordinasi yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pusat juga mutlak dibutuhkan karena izin pertambangan melibatkan kedua lembaga tersebut.

Kami juga mengangkat artikel yang membahas cara menentukan harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang. Pedoman tersebut berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 1348.K/30/DJB/2011.

Tidak kalah penting mengenai neraca sumberdaya dan cadangan mineral. Kondisi saat ini, data pertambangan yang disusun oleh pemerintah pusat dan daerah belum sinkron. Masih terdapat perbedaan data yang signifikan, padahal data pertambangan digunakan sebagai dasar mempersiapkan Wilayah Pertambangan dan

untuk keperluan pengembangan pengetahuan & teknologi pertambangan.

Pada edisi ini kami sajikan pula beberapa event penting Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada kurun Januari hingga April 2012. Diantaranya kegiatan *coffee morning* DJMB, pameran di acara Jambi Emas Expo 2012, Rapat Kerja DJMB, dan Koordinasi Pelaksanaan Permen 7/2012.

Pesan utama yang kami usung dalam artikel-artikel pada edisi ini adalah pertambangan harus dikembalikan sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kami juga menampilkan hasil liputan tim warta ke PT Adaro Indonesia. Tema yang diangkat adalah mengenai *sustainability* melalui sinergi *profit, people, dan planet*. Mudah-mudahan kisah yang kami sajikan tersebut dapat memberi gambaran betapa pentingnya menjaga kelangsungan produksi tambang sekaligus juga bersahabat dengan masyarakat sekitar dan peduli akan lingkungan.

Seperti biasa, Si Mino setia menyapa Anda di bagian akhir. Kali ini Mino dan Dino berdiskusi mengenai lahan perkebunan yang sekaligus memiliki komoditas pertambangan. Mana yang harus diutamakan? Mino punya jawabnya.

Selamat menyimak.

Menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan



Mohamad Anis ST. MM.

Kasi. Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Batubara dan Panas Bumi, Subdit. P-3

Batubara adalah produk energi strategis bagi bangsa Indonesia. Sudah saatnya optimalisasi batubara di dalam negeri, bukan menjualnya ke luar negeri

Kebutuhan energi dan sumber daya alam akan semakin semakin tinggi. Tidak dapat dipungkiri pemenuhan energi menjadi penggerak roda perekonomian dan perkembangan industri.

Berbeda dengan negara maju yang telah lama menyadari pentingnya energi untuk kemajuan ekonominya, Indonesia justru memberikan gambaran yang mengkhawatirkan. Sebagai contoh, permintaan batubara oleh industri dalam negeri masih sangat rendah. Ditambah lagi harga jual batubara di dalam negeri juga belum kompetitif. Akibatnya, pelaku usaha pertambangan cenderung berorientasi ekspor.

Di satu sisi, ekspor batubara memang menambah devisa negara dalam bentuk Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP). Akan tetapi, menjual batubara keluar negeri bukanlah strategi yang tepat. Batubara hendaknya

dipandang sebagai produk energi strategis yang dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendorong berkembangnya industri di dalam negeri. Sudah saatnya batubara ditempatkan sebagai modal utama pembangunan nasional, bukan sebagai komoditas yang mendatangkan devisa semata.

Namun, menjadikan batubara sebagai produk energi strategis membutuhkan kerjasama yang baik antar berbagai pihak, pusat maupun daerah, pemerintah dan juga swasta. Mengingat batubara adalah sumber daya tak terbarukan, dibutuhkan optimalisasi sumber daya batubara secara berkelanjutan.

Sebagai negara yang kaya akan bahan galian mineral, Indonesia harusnya mampu mengelola sumber daya alam tak terbarukan tersebut secara bijaksana dan berkesinambungan. Kegiatan pertambangan selalu dihadapkan dua kepentingan: kebutuhan akan sumber daya alam dan aspek kerusakan lingkungan. Itu sebabnya, pola pengelolaan yang bijaksana dan berkesinambungan sangat penting.

Dalam kajiannya, Bambang T.S dan R. Hutamadi (2003) membahas hubungan kedua kepentingan di atas secara dikotomis. Pengelolaan sumber daya mineral selalu dihadapkan pada dua kepentingan besar, yaitu usaha peningkatan produksi (atau konsumsi) bahan galian dan usaha proteksi (atau pelestarian) lingkungan hidup.

Pada satu sisi, pemanfaatan bahan galian adalah langkah positif yang tak terhindarkan untuk mencukupi kebutuhan komoditi mineral. Hal ini mendorong upaya eksploitasi bahan galian semaksimal mungkin. Pada sisi lainnya, kegiatan pertambangan membawa dampak dampak kerusakan lingkungan.

Bambang T.S dan R. Hutamadi menambahkan Konservasi Bahan Galian (KGB) pada hakikatnya adalah upaya perlindungan, perbaikan, dan penggunaan bahan galian secara bijaksana yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tinggi, menjaga kelestarian fungsi lingkungan, serta menjamin kesinambungan pembangunan bagi masyarakat. Oleh karenanya, KGB diharapkan mampu menjadi titik tengah yang bersifat menjaga keseimbangan (*equalizer*) dan menjadi jembatan kedua kepentingan tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan KGB berdasarkan paradigma, program dan strategi yang tepat, maka diperlukan penyusunan kebijakan KGB dan mensosialisasikannya secara nasional.

Dalam UU Mineral dan Batubara yang terbaru, sudah diatur bahwa pemerintah berwenang menetapkan kebijakan tentang konservasi (ps. 6). Selanjutnya, penerapan kaidah konservasi harus sudah mulai diberlakukan dari awal penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sampai

kegiatan pascatambang (ps:18, 27, 32, 39, 76, 95, 140). Sebelumnya kebijakan konservasi juga telah diatur dalam berbagai produk hukum, diantaranya:

- UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba;
- UU. No. 23/1997 tentang Lingkungan Hidup;
- UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- PP No. 25/2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- PP No. 70 Tahun 2009, Tentang Konservasi Energi;
- Keputusan Menteri No.1261/K/25/MPE/1999 tentang Pengawasan Produksi Pertambangan Umum;
- Inpres No. 5 Tahun 2006, tentang Kebijakan Energi nasional (KEN), salah satunya mengatur tentang pemanfaatan energi batubara pada tahun 2005 sebanyak 15% dari total kebutuhan energi nasional menjadi 34% pada tahun 2025, hal ini dimaksud untuk mengganti pengurangan peran dari bahan bakar minyak (BBM);
- Kepmen ESDM No. 1128 Tahun 2004, tentang Kebijakan Batubara Nasional (KBN), Kepmen ini mendukung kebijakan keamanan pasokan energi nasional, khususnya energi yang berbasis batubara; dan
- Keputusan Menteri No.1453/K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Pengawasan Konservasi Bahan Galian Pertambangan Umum.

Namun, kebijakan dan peraturan di atas ternyata belum implementatif untuk mendukung tujuan awal konservasi. Oleh karena itu, untuk itu mendukung pelaksanaan KGB, diperlukan penyusunan kebijakan KGB dan mensosialisasikannya secara nasional.

Penyusunan regulasi ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dengan

menyediakan peraturan dan kebijakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan sektor pertambangan umum yang berlandaskan hukum dan kaidah konservasi.

Indonesia mempunyai potensi batubara dan mineral yang cukup besar. Terutama di daerah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Irian Jaya. Masih banyak potensi batubara tersebut yang belum 'terjamah', sehingga mengundang para investor dari luar ataupun dalam negeri melirikinya. Ketertarikan investor untuk mengusahakan pertambangan batubara tentu harus disambut positif karena akan membawa dampak ekonomi yang baik. Tetapi, hal ini juga sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bekerja lebih profesional, efisien, dan inovatif agar dapat membuka atau mempertahankan kesinambungan usaha yang sudah ada dalam memperoleh keuntungan.

Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan merupakan daerah yang mengandung paling banyak endapan batubara. Disusul Pulau Jawa, Sulawesi dan Irian Jaya. Data yang diperbaharui pada 2011 akhir menunjukkan Indonesia memiliki sumber daya batubara sebesar 120,34 miliar ton. Indonesia juga memiliki cadangan total batubara sebesar 28,12 miliar ton. Ini merupakan cadangan sumber energi terbesar dibandingkan dengan sumber energi utama lainnya.

Cadangan terbesar tersebar di Sumatera Bagian Tengah Utara (9,16%), Bagian Selatan (40,13%), Kalimantan Barat-Tengah (4%), Kalimantan Timur (28,5%), dan Kalimantan Selatan (26%), lihat gambar berikut:



Masalah Pertambangan Batubara

Beberapa faktor yang menyebabkan kebijakan penerapan aspek konservasi sumber daya belum optimal antara lain:

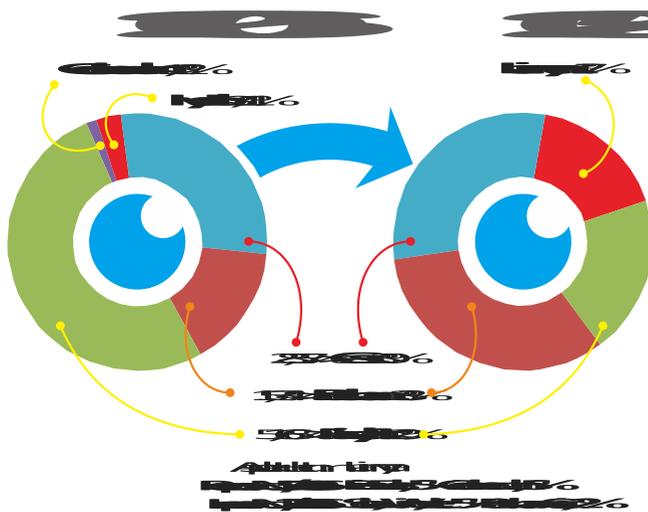
- Pada kondisi awal, perhitungan sumberdaya dan cadangan batubara yang kurang optimal (penentuan nisbah kupas/SR yang belum akurat) dan kemudian dalam hal perencanaan tambang kondisi geologi yang tidak diantisipasi dalam pemodelan awal desain tambang;
- Kurangnya antipasi terhadap kondisi peruntukan lahan di area lokasi penambangan, berupa gangguan dari pihak luar, misal peti, blokade masyarakat dll;
- Secara keekonomian, harga batubara yang relatif belum kompetitif di dalam negeri, permintaan pasar akan spesifikasi batubara yang berubah/tidak sesuai spek cadangan yang tersedia;
- Belum adanya kebijakan khusus konservasi yang imlementatif, misal kebijakan maupun peraturan yang tidak sinkron dengan kebijakan maupun strategi perusahaan tambang batubara;
- Belum adanya metode khusus untuk menjawab kepentingan konservasi dan program reklamasi pada perusahaan pertambangan batubara. Penerapan strategi maupun metoda penambangan yang belum tepat dan tidak efisien. Masih banyak areal tambang yang belum optimal penambangannya, sementara masih banyak areal bekas tambang yang belum direklamasi; dan
- Belum adanya kebijakan pascatambang untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Pemanfaatan Energi Nasional

Walaupun Indonesia memiliki sumber daya mineral yang cukup melimpah, tetapi yang harus diantisipasi kebutuhan energi saat ini dan di masa datang akan semakin tinggi. Tidak dapat dipungkiri, energi merupakan penggerak roda perekonomian dan pengembangan industri. Hal ini terbukti, selain sebagai penyedia sumber energi, sektor ini juga berperan besar menggulirkan banyak manfaat. Misalnya sebagai sumber devisa, penerimaan

negara, sumber bahan baku industri, wahana alih teknologi, pendukung pengembangan wilayah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan pendorong pertumbuhan sektor lain.

Komoditi dari sektor energi masih memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, menyumbang hampir mencapai 30% dari total pendapatan negara. Perbaikan iklim investasi mutlak diperlukan guna terus mendukung fungsi sektor energi dan sumber daya mineral sebagai tulang punggung penggerak roda ekonomi nasional dalam tahun-tahun mendatang (lihat gambar berikut)



Gambar Proyeksi Kebijakan KEN kebutuhan batubara sebesar 30 % di tahun 2025

Dalam tahun-tahun mendatang, sektor industri akan terus menjadi konsumen energi final yang paling besar. Berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemanfaatan energi batubara pada 2005 sebanyak 15% dari total kebutuhan energi nasional. Pada 2025 porsi batubara akan meningkat menjadi 34%. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi peran bahan bakar minyak (BBM).

Berbeda dengan sektor transportasi yang hanya mengkonsumsi BBM, sektor industri mengkonsumsi berbagai jenis energi final, seperti BBM (35-40%), gas bumi (30-35%), batubara (15-18%), LPG (0-1%), dan listrik (10-12%). Dengan meningkatnya harga BBM akhir-akhir, ada potensi untuk menggeser kedudukan BBM di sektor industri oleh berbagai jenis energi final lainnya.

Gas bumi, batubara, dan *liquid petroleum gas* (LPG) menjadi lebih kompetitif digunakan sebagai energi bagi industri. Belum lagi energi final lainnya yang bersumber dari nabati (biofuel) ataupun hayati (biomass), yang jika dikelola dengan baik akan merupakan sumber energi alternatif yang juga kompetitif.

Menurut Nyoman Nurjaya (2008), kebijakan pemanfaatan sumber daya tambang hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara yang dilakukan dengan mengundang investor besar. Dia juga menambahkan UU tersebut bernuansa sentralistik dan sarat dengan orientasi ekonomi. Dengan semangat sentralistik itu maka ada ruang bagi pengaturan mengenai partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Walaupun pengaturan secara otonomi sudah diterapkan ke daerah tetapi perlu diatur suatu kebijakan yang lebih tegas dan implementatif untuk mempersiapkan secara nasional maupun pada suatu wilayah provinsi dengan potensi sumber daya mineral yang melimpah. Paradigma yang harus dibangun adalah kebijakan tidak melulu soal meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga pengamanan energi nasional.

Pengelolaan sumber daya batubara yang tidak benar akan menimbulkan banyak permasalahan di daerah yang justru kaya akan sumber daya batubara. Adanya konflik-konflik lokal pada masyarakat sekitar tambang menunjukkan belum maksimalnya dampak positif yang diterima oleh masyarakat sekitar tambang. Misalnya blokade areal tambang, masalah lingkungan, ganti rugi lahan, perbedaan kultural antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal, dan permasalahan lainnya. Pemerintah daerah juga mengakui, meski sudah ada peningkatan, kontribusi sektor pertambangan dianggap belum optimal mengisi kantong kas daerah. Pemerintah daerah umumnya belum menerapkan skala prioritas dalam melaksanakan beberapa sektor pembangunan. Persiapan sumber daya manusia yang kompeten belum dilakukan. Ketidaksiapan regulasi yang implementatif untuk menunjang pengelolaan sumber daya batubara juga cenderung diabaikan sehingga terjadilah permasalahan di atas.

Dalam Laporan Bappenas tahun 2008,

disebutkan pembangunan yang seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup adalah prinsip pembangunan yang senantiasa menjadi dasar pertimbangan utama bagi seluruh sektor dan daerah guna menjamin keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009, perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar sumber daya alam mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk juga lingkungannya, dalam jangka panjang dengan tetap menjamin kelestariannya.

Dengan demikian, sumber daya alam diharapkan dapat tetap mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dalam kaitan ini, pembangunan berkelanjutan terus diupayakan menjadi arus utama dari pembangunan nasional di semua bidang dan daerah.

Peran Penting Batubara

Pelaku usaha sektor pertambangan batubara terus meningkat. Tidak dapat dipungkiri batubara masih menjadi sumber energi utama yang relatif mudah diusahakan. Sampai saat ini telah ribuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan di berbagai daerah yang umumnya kaya akan sumber daya batubara. Belum lagi perusahaan yang eksis berjalan, baik yang berizin PKP2B maupun IUP Batubara.

Akan tetapi produksi dan ekspor batubara kita telah mencapai tren yang selalu menembus di atas seratus persen. Hal tersebut dapat dicermati dengan melihat perkembangan dari sisi ekspor. Indonesia menjadi pengekspor batubara terbesar kedua di seluruh dunia.

Jumlah ekspor batubara mencapai tiga kali lipat angka domestik. Porsi ini cenderung dari tahun ke tahun. Perkembangan realisasi produksi batubara Indonesia pada 2010 sebesar 256 juta ton. Porsi untuk ekspor sebanyak 200 jutaan ton dan penjualan domestik hanya 56 juta ton. Artinya, di samping produksi batubara Indonesia yang terus meningkat, jumlah ekspor juga tetap meningkat.

Hal tersebut sejalan dengan perkembangan industri batubara dunia saat ini. Batubara memberikan kontribusi 25% dari energi dunia dan menghasilkan 40% dari listrik dunia. Sebagian besar dari batubara ini dihasilkan oleh negara Eropa, Eurasia, dan juga Asia Pasifik.

Meningkatnya permintaan pasar dunia yang akan batubara mendorong tingkat kenaikan harga batubara. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan harga batubara yang semakin tinggi di pasar ekspor (diolah dari berbagai sumber).

Yang menjadi keprihatinan justru di dalam negeri. Tingkat serapan kebutuhan dalam negeri terhadap batubara tercatat stagnan dan belum mengalami perubahan yang signifikan. Selama ini pelaku usaha hanya mempunyai kecenderungan untuk memenuhi pasar ekspor saja akibat tingginya permintaan dunia. Dapat dikatakan kita masih sulit untuk 'mengerem' perilaku perusahaan batubara yang selalu menaikkan tingkat produksi tanpa mempertimbangkan kemampuan serapan dalam negeri (lihat tabel 1).

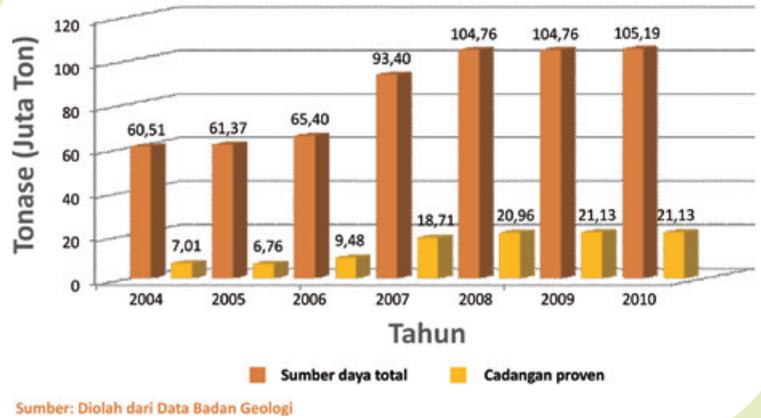
Tabel 1. Perkembangan Pertumbuhan Produksi, Domestik dan Ekspor Batubara tahun 2006-2010

	Rencana Awal (Juta Ton)									Pencapaian Realisasi (Juta Ton & %)									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010*)	%
Produksi	169	196	230	250	270	280	290	297	309	193	114	217	111	240	104	256	102	282	204
Ekspor	124	147	173	184	205	210	215	201	199	145	117	163	111	191	110	198	108	217	106
Domestik	46	49	57	66	65	70	75	96	110	48	104	54	110	49	86	56	85	65	100

*) Realisasi 2010 kondisi Juni 2011;

Pencapaian realisasi produksi >100% (104%-117%), Kecuali domestik 2008-2009, karenapenyerapan pasokan PLN (10.000 MW) < 100%

Dari gambaran tabel 2 di bawah, menunjukkan serapan batubara domestik masih rendah. Oleh karena itu perlu pengaturan yang lebih jelas untuk pemberlakuan DMO/penetapan harga pada perusahaan batubara di daerah agar sesuai kebijakan nasional. Kebijakan dan peraturan ini diharapkan dapat menjembatani kebijakan makro yang telah ada menjadi kebijakan yang lebih rinci dalam hal pengendalian produksi/ ekspor. Pengaturan ini diharapkan



Gambar 1. Proyeksi Kebijakan KEN kebutuhan batubara sebesar 30 % di tahun 2025

Tabel 2. Pertumbuhan Produksi, Domestik dan Ekspor Batubara Tahun 2006-2010

	Pencapaian (Juta Ton)					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011*)
Renc. Domestik (a)	46	49	57	66	65	70
Keb. DMO (b)**)				56	67	79
Realisasi***)	48	54	49	56	65	43
Prosen (a)	104.35%	110.20%	85.96%	84.85%	100.00%	61.43%
Prosen (b)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	97.01%	54.45%

Keterangan:

*) Realisasi 2011 Kondisi pada bulan Desember 2011;

***) Kebijakan MESDM tentang DMO tetapi hanya diberlakukan kepada PKP2B dan di tahun 2011 ditambahkan 10 perusahaan IUP

****) Realisasi domestik total Indonesia meliputi PKP2B, IUP BUMN dan IUP swasta

dapat terwujud melalui optimalisasi peran antar sektor terkait, misalnya perdagangan, industri dan penanaman modal untuk mendorong penggunaan batubara untuk industri dalam negeri.

Kemudian, hal lain yang menjadi keresahan kita adalah tingkat pertumbuhan sumber daya dan cadangan kita yang cenderung lambat. Berdasarkan data yang diolah dari Badan Geologi sampai 2010, kondisi perkembangan sumber daya dan cadangan batubara Indonesia melambat dan cadangan batubara yang hanya 3% akan habis dalam lima tahun kedepan, (lihat gambar 1).

Gambar 1. belum menunjukkan kondisi perkembangan sumber daya dan cadangan yang belum terdata secara akurat dari keseluruhan pelaku usaha pertambangan pada tahapan izin operasi produksi. Melihat kondisi ini aspek konservasi dari

sisi perhitungan sumber daya dan cadangan harus secara optimal dilakukan baik dari sisi pelaku usaha pertambangan maupun dari sisi bimbingan dan pengawasan oleh aparat instansi terkait.

Pertumbuhan harga batubara menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pelaku usaha pertambangan batubara berorientasi ke pasar ekspor. Dari gambaran tabel di samping terlihat bahwa apapun spesifikasinya, harga batubara tetap meningkat signifikan. Disamping itu, harga minyak mentah yang cenderung naik turut pula mempengaruhi penerimaan pasar internasional akan batubara Indonesia.

Pertumbuhan harga batubara jelas meningkatkan devisa negara. Namun, saat ini masih sebagai penambah devisa negara saja sementara serapan kebutuhan dalam negeri masih lambat. Dengan demikian batubara belum menjadi aset energi yang potensial untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Kemudian dari aspek teknis hal-hal diatas juga menunjukkan tingkat optimalisasi sumber daya dan cadangan batubara mulai dari perhitungan, penambangan sampai dengan pemanfaatan muntlak diperlukan untuk memenuhi aspek konservasi dan menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Mengingat pentingnya peran batubara tersebut, harusnya ada mengubah paradigma kita akan batubara. Hingga saat ini batubara hanya berupa komoditas energi bahan tambang sebagai

Tabel 3. Pertumbuhan harga batubara tahun 2006 s.d. 2010

Tahun	Harga Batubara (US/ton)								
	HBA (CV 6.322)	CV 7.000	CV 6.700	CV 6.200	CV 5.700	CV 5.400	CV 5.000	CV 4.400	CV 4.200
2006	46,41	49,67	50,56	45,75	38,09	37,59	35,76	28,78	26,43
2007	62,41	67,00	66,87	60,33	51,03	49,11	45,94	37,01	33,75
2008	121,77	131,30	127,04	114,43	99,02	91,82	83,70	67,55	60,92
2009	70,59	75,86	75,16	67,79	57,64	54,99	51,15	41,22	37,50
2010	87,78	94,48	92,48	83,45	71,54	67,36	62,08	50,06	45,37

Catatan:

Harga realisasi PKP2B dan IUP direpresentasikan oleh HBA dan marker batubara dalam satu tahun karena *forecast* harga yang dilakukan oleh pemberbit index harga batubara ditentukan berdasarkan harga realisasi yang terjadi di lapangan

penambah devisa negara saja. Batubara perlu dipandang sebagai modal utama pembangunan baik untuk jangka pendek ataupun di masa mendatang. Langkah selanjutnya kita harus selalu menjaga dan menjamin ketersediaannya bagi pemenuhan kebutuhan akan energi di dalam negeri selama dan seekonomis mungkin. Oleh karena itu, pengelolannya perlu dilaksanakan melalui kebijakan yang terpadu dan bersinergi dengan sektor lain.

Di samping itu, batubara mempunyai potensi dan harapan sebagai energi pelengkap dan penyuluh BBM yang cadangannya makin menipis, dan pengganti penggunaan kayu bakar sebagai energi dalam industri yang dalam memperolehnya berpotensi merusak hutan, dan mampu memasok energi dalam jangka panjang. Batubara memiliki peran strategis karena batubara juga dapat memberikan pengaruh efek ganda terhadap ekonomi nasional dan daerah, seperti penyerapan tenaga kerja, penumbuhan pusat kegiatan ekonomi di daerah terpencil, pengembangan wilayah dan masyarakat, dan peningkatan pendapatan berupa pajak, royalti, devisa kepada pemerintah pusat maupun daerah.

Kebijakan Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) didefinisikan sebagai perimbangan pemenuhan kebutuhan manusia dengan perlindungan terhadap lingkungan alamiah supaya kebutuhan disini tidak hanya

untuk pemenuhan di masa sekarang tetapi juga di masa depan. Paradigma ini telah diutarakan pada 1987 dalam laporan Brundtland dari Komisi Dunia pada Lingkungan dan Pengembangan (*World Commission on the Environment and Development*). Kemudian pada 2002, *Global Mining Initiative* (GMI) mempublikasikan sebuah laporan setebal 440 halaman dengan judul "*Breaking New Ground: Mining, Minerals and Sustainable Development* (IIED 2002)". Laporan ini merangkum ide saat ini, berpikir, dan metodologi di berbagai tema dari kebutuhan untuk mineral dengan dampak pada masyarakat lokal dan global. Di negara tertentu, seperti Polandia, ada beberapa efek negatif yang dihasilkan dari industri pertambangan (Barbara, R.-Bak, 2008, hal 75-79). Pada kondisi selanjutnya harus ditambahkan faktor-faktor lain seperti sumber daya manusia (termasuk partisipasi masyarakat lokal), teknologi, manajemen lingkungan, infrastruktur keunggulan pengembangan program dan faktor lainnya. Dimasa transisi ini, ketika UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba belum diberlakukan secara utuh. Nuansa paradigma lama yang terkandung pada UU No. 11 tahun 1967 tentang pertambangan di tingkat nasional belum menyentuh secara lebih tegas pengelolaan sumber daya mineral yang diarahkan pada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian kita memerlukan program konservasi. Program ini dapat diterapkan dengan suatu kebijakan konservasi bahan galian yang tidak hanya diarahkan semata-mata untuk tujuan proteksi suatu bahan galian atau suatu kawasan dan juga bukan untuk liberalisasi eksploitasi sumber daya alam. Berbeda dengan konservasi

Batubara memiliki peran strategis karena batubara juga dapat memberikan pengaruh efek ganda terhadap ekonomi nasional dan daerah.

sumber daya hayati, KBG lebih diarahkan kepada pemanfaatan sumber daya dan cadangan secara optimal bagi kepentingan masyarakat, pencegahan penyalahgunaan bahan galian, teknik penambangan/pengolahan yang berwawasan lingkungan, serta pembangunan komunitas yang berkelanjutan. Dalam implementasinya, kebijakan konservasi memerlukan strategi dasar yang berbeda untuk kawasan Indonesia bagian barat dan timur sesuai dengan karakter masing-masing wilayah tersebut (Bambang T. S dan R. Hutamadi, 2003).

Dalam hubungan dengan peningkatan investasi di sektor pertambangan, kebijakan konservasi bahan galian diharapkan dapat mendorong pemanfaatan bahan galian yang memiliki nilai tambah dan potensi pasar yang tinggi, serta industri pertambangan yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Kebijakan ini menyangkut proses perijinan sejak penyelidikan umum, eksplorasi sampai tahap eksploitasi atau produksi tambang. Selain itu juga termasuk kebijakan yang menyangkut standarisasi pengelolaan usaha pertambangan yang berasaskan optimalisasi bahan galian, berpihak kepada masyarakat lokal dan berwawasan lingkungan. Peranan pengusaha swasta sangat diperlukan untuk penerapan kebijakan ini terutama untuk pengembangan pertambangan skala besar. Sedangkan pemerintah hanya menjalankan fungsi administratif dan fasilitator, tanpa perlu terjun sebagai pelaku bisnis pertambangan umum.

Implikasi yang Diharapkan

Secara lebih umum, berikut ini adalah sebagian kecil langkah awal untuk memenuhi aspek konservasi berupa implikasi hasil tulisan yang dapat diberikan antara lain:

- Aspek hulu berupa mendapatkan metoda dengan parameter yang jelas dan terukur dalam mencapai optimalisasi cadangan batubara, antara lain:
 - Optimalisasi data perhitungan sumberdaya dan cadangan batubara;
 - Metoda penambangan yang tepat dapat menekan tingkat kehilangan/losses,
 - *Recovery* penambangan diharapkan dapat mencapai 100%,
 - Meminimalisir batubara yang tersisa di areal tambang dan terbuang sebagai *overburden*, dll;
- Pemenuhan aspek lingkungan sesuai *Good Mining Practice*, antara lain:
 - Pemenuhan jadwal *backfilling*, pola kemajuan tambang dan penempatan OB maupun tanah penutup yang tepat,
 - Pemenuhan program reklamasi dan pasca tambang dengan mempertimbangkan aspek konservasi, dll;
- Memberikan masukan maupun panduan yang jelas penggunaan lahan bekas tambang baik kepada pelaku usaha pertambangan maupun pembuat kebijakan agar dapat memenuhi aspek konservasi dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan;
- Dari aspek hilir, pemenuhan aspek konservasi memberikan dampak optimalisasi pemanfaatan batubara antara lain berupa diversifikasi energi berbasis batubara (*coal liquifaction*, UBC, briketisasi dll) serta usaha perluasan dan peningkatan serapan batu-bara industri di dalam negeri (misal konversi BBM ke batubara dll).

Walaupun masih berupa gambaran umum, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah betapa pentingnya membuat suatu kebijakan pengelolaan sumber daya batubara yang membunmi dan pro rakyat. Salah satunya adalah penerapan kebijakan konservasi maupun peraturan lainnya yang terkait (misal pembatasan produksi/ekspor dan penerapan kuota) untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Menentukan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang



Rina Handayani, S.T.
Staf Bagian Rencana dan Laporan



Benny Hariyadi, ST.
Staf Bagian Rencana dan Laporan

DALAM RANGKA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK yang berkesinambungan maka diperlukan formula harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang. Hal ini terutama untuk menjamin ketersediaan batubara bagi pembangkit listrik mulut tambang yang akan mulai beroperasi pada 2012.

PLTU Mulut Tambang dibangun di dekat lokasi tambang karena harga batubara akan lebih murah sehingga meniadakan ongkos kirim.

PLTU mulut tambang merupakan pembangkit yang dibangun di dekat lokasi tambang. Dengan begitu, harga batubara mulut tambang akan lebih murah karena tidak memerlukan ongkos angkut yang terlalu mahal. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan peraturan berupa Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor **1348.K/30/DJB/2011**, tentang Penentuan Harga Batubara untuk Pembangkit Mulut Tambang.

Hal terkait juga telah tertuang pada pasal 2 ayat 1 "Dirjen atas nama Menteri menetapkan harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang dengan formula harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang."

Terdapat dua jenis formula harga batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang, yaitu untuk batubara dengan nilai kalori lebih besar atau sama dengan 3.000 KKal/Kg (GAR) dan yang kurang dari dengan 3.000 KKal/Kg (GAR) dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertama, untuk batubara dengan nilai kalori lebih besar atau sama dengan 3.000 KKal/Kg (GAR) dapat dijual dengan

harga di bawah Harga Patokan Batubara (HPB) yang disetujui oleh Dirjen berdasarkan hasil kajian yang akan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal.

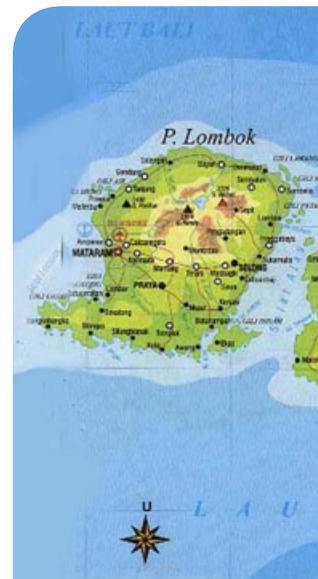
Kedua, untuk batubara dengan nilai kalori kurang dari 3.000 KKal/Kg (GAR) ditetapkan dengan formula biaya produksi ditambah margin. Adapun biaya produksi batubara didasarkan pada perhitungan yang disampaikan oleh perusahaan sebagai penjual batubara untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Sedangkan yang disebut margin adalah keuntungan perusahaan sebagai penjual

batu bara sebesar 25% dari biaya produksi. Sementara itu, untuk pembangkit listrik mulut tambang yang penggunaannya untuk proses produksi, harga batubara ditetapkan dengan formula biaya produksi ditambah margin.

Selanjutnya pada pasal 6 disebutkan, saat Perdirjen ini mulai berlaku, perusahaan lain yang telah menetapkan harga batubara untuk keperluan pembangkit listrik mulut tambang sebelum berlakunya Perdirjen ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Perdirjen ini dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan sejak berlakunya perdirjen ini.





Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral sebagai Database Pertambangan

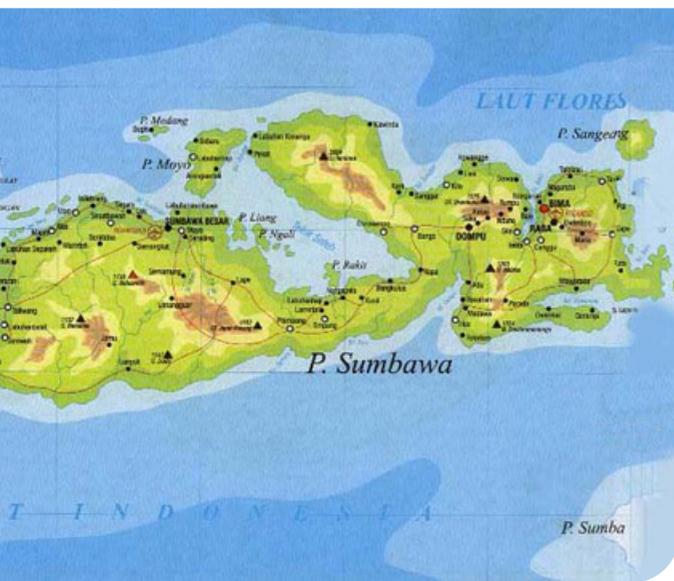


T. Budi Mantoro
Staf Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Mineral

Indonesia beruntung menjadi negara yang mendapat anugerah kekayaan sumber daya alam seperti hutan, air, pertambangan dan lain-lain. Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana sekarang kita dapat menjaga dan memanfaatkan sumberdaya alam tersebut secara cerdas dan optimal.

Khususnya di bidang pertambangan, negara kita sangat berlimpah dengan jenis pertambangan yang ada. Indonesia memiliki mineral logam, mineral bukan logam, mineral radioaktif, batuan maupun batubara. Keterdapatn bahan galian tersebut hampir terdapat di semua kepulauan, mulai dari Aceh hingga Papua.

Seperti diamanatkan dalam pasal 87 s/d 89 Undang-undang No 4 Tahun 2009, data pertambangan merupakan penunjang dalam mempersiapkan Wilayah Pertambangan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan. Jadi, betapa pentingnya arti dari pembuatan neraca dan sumberdaya mineral sebagai database pertambangan mineral di Indonesia untuk



mengetahui keterdapan/lokasi bahan tambang, berapa banyak jumlah dan kualitas dari masing-masing jenis mineral yang ada di masing-masing daerah tersebut.

Saat ini data pertambangan yang telah dibuat, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, belum menunjukkan adanya kesesuaian data atau terdapat perbedaan data. Dengan demikian perlu adanya kesesuaian data tersebut yang dapat mencerminkan perbedaan data yang tidak terlampau jauh. Data tersebut dapat menjadikan pegangan bagi pemerintah maupun *stakeholder* dalam membuka usaha pertambangannya di Indonesia.

Kendala Bagi Pemerintah Daerah

Penyusunan neraca dan sumberdaya mineral oleh pemerintah daerah selama ini masih menyajikan data yang cukup lama, sehingga data tersebut tidak aktual dan ada kendala tersendiri apabila data tersebut akan dipakai.

Disamping pemutakhiran data pertambangan, perlu juga koordinasi dan sosialisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah sehingga diharapkan terdapat persepsi yang sama dalam pembuatan neraca dan sumberdaya mineral.

Dari beberapa contoh pembuatan neraca sumberdaya dan mineral yang telah dilakukan oleh beberapa provinsi dan Pusat Sumber Daya Geologi Bandung, tampak belum ada kesamaan persepsi. Data yang ditampilkan oleh daerah terlihat masih sederhana tetapi tampilan data yang ditampilkan

oleh Pusat Sumber Daya Geologi sudah cukup representatif dengan melakukan pembagian/klasifikasi baik terhadap sumberdaya maupun cadangannya.

Ketidak-sinkronan data ini dipicu juga oleh kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah, yaitu kurangnya sumberdaya manusia yang berlatarbelakang geologi dan pertambangan. Ditambah lagi masih ada pemerintah daerah yang belum menyadari betapa pentingnya data pertambangan yang ada di masing-masing daerahnya.

Kendala lain yang tak kalah pentingnya lagi adalah seringnya terjadi *rolling* penempatan pegawai di daerah sehingga tenaga baru yang ada tersebut akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dalam menyusun atau mengupdate

Contoh penyusunan neraca sumberdaya dan cadangan mineral Proinsi Jawa Tengah untuk bahan galian batu setengah mulia

NO	LOKASI	JUMLAH BG	SDM TEREKA (JUTA TON) BATU 1/2 MULIA
1	KAB. SEMARANG	-	-
2	KAB. DEMAK	-	-
3	KAB. KENDAL	-	-
4	KAB. GROBOGAN	-	-
5	KAB. TEGAL	-	-
6	KAB. PEKALONGAN	-	-
7	KAB. PEMALANG	-	-
8	KAB. BREBES	-	-
9	KAB. BATANG	-	-
10	KAB. PATI	-	-
11	KAB. BLORA	-	-
12	KAB. REMBANG	-	-
13	KAB. JEPARA	-	-
14	KAB. KUDUS	-	-
15	KAB. WONOGIRI	1	Hipotetik
16	KAB. SUKOHARJO	-	-
17	KAB. SRAGEN	-	-
18	KAB. KARANGANYAR	-	-
19	KAB. BOYOLALI	-	-
20	KAB. KLATEN	-	-
21	KAB. MAGELANG	-	-
22	KAB. TEMANGGUNG	-	-

Catatan:

Hanya beberapa kabupaten saja yang ditampilkan dalam tulisan ini

Penyusunan Potensi Bahan Galian Logam di Provinsi NTB

No.	JENIS BAHAN GALIAN	SAT.	LOMBOK BARAT	LOMBOK UTARA	LOMBOK TENGAH	LOMBOK TIMUR	SUMBAWA BARAT	SUMBAWA	DOMPU	Kab. BIMA	JUMLAH
1.	BELERANG	Ton	-	92	5	-	-	-	184	-	281
2.	EMAS	Ton	1,86	-	-	-	426.995	1.671	-	0,3	428.668,16
3.	PASIR BESI	Ton	7	-	3	200	-	14.246	2.750	5.298	22.502
4.	PERAK	Ton	-	-	-	-	321.370	-	-	-	321.370
5.	TEMBAGA	Ton	-	-	-	-	4.837.435	-	-	-	4.837.435
6.	MANGAN	Ton	2.510	-	-	-	-	773.053	71.626,5	-	844.678,5
7.	TIMAH HITAM	Ton	-	-	2.450	-	-	-	-	-	2.450

Penyusunan Neraca Sumberdaya dan Cadangan oleh Pusat SumberDaya Geologi Bandung

SUMBER DAYA/CADANGAN BATUAN KALIUM													
LOKASI				SUMBER DAYA (TON)				JUMLAH	CADANGAN (TON)		JUMLAH	KETERANGAN	SUMBER
DAERAH	PROV.	KAB.	KEC.	HIPOTETIK	TEREKA	TERTUNJUK	TERUKUR		TERKIRA	TERBUKTI			
Bukit Gebangan, Dusun Gebangan, Desa Patemon	Jatim	Situbondo	Bungatan	0	117.500.000	0	0	117.500.000	0	0	0	Tuf putih (diduga felspar) tersingkap di bukit, kompak, warna putih kuning kecoklatan, terdapat kekar, mengandung kuarsa, sorting buruk.	PMG-2008
		Jumlah		0	117.500.000	0	0	117.500.000	0	0	0		

neraca pertambangan yang ada terlebih lagi bila tenaga baru tersebut bukan tenaga teknis.

Solusi

Untuk mengatasi perbedaan dalam penyusunan neraca dan sumberdaya pertambangan di daerah, maka diperlukan adanya pembekalan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat kepada pegawai/aparat pemerintah daerah di bidang pertambangan untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan dan pemutakhiran data pertambangan yang dimaksud.

Perlunya pemerintah pusat memberikan sosialisasi ke daerah-daerah untuk menjelaskan arti pentingnya penyusunan data pertambangan dan cara mengklasifikasi sumberdaya dan cadangan bahan tambang tersebut serta selalu saling melakukan koordinasi baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga pada akhirnya data pertambangan yang diharapkan seperti penyusunan neraca sumberdaya dan cadangan mineral dapat dibuat sesuai dengan aturan yang ada.

Contoh Penyusunan Potensi Bahan Galian Provinsi Jawa Barat

No	JENIS BAHAN GALIAN	CIANJUR	SUKABUMI	BOGOR	PURWAKARTA	KARAWANG
1	ANDESIT	na	74.942.162,58	51.140.818,58	1.623.527.511,40	870.060.508,00
2	BATU GAMPING/KAPUR	na	78.731.944,26	30.377.215,66	11.885.535,00	126.280.000,00
3	BENTONIT	157.842.180,00	1.823.032,98	1.822.028,34		
4	DIATOME			552,00		
5	FELDSPAR	2.218.718,99	441.765,55	3.022.827,50		
6	FOSFAT		40.000,00	32.780,00		
7	GIPSUM					
8	KAOLIN			30.000,00		
9	MARMER		3.617.761,99			

catatan: hanya beberapa kabupaten saja yang ditampilkan dalam tulisan ini

Pemanfaatan Batubara sebagai Energi Alternatif

Batubara merupakan kekayaan alam yang memiliki potensi untuk mensejahterakan rakyat. Komoditi sumber fosil ini akan berguna bila diusahakan dan berproduksi. Salah satu inti dari kegiatan proses pertambangan adalah produksi, karena dengan produksi tersebut akan berdampak pada penerimaan negara yang selanjutnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam konteks Internasional Emisi gas rumah kaca (*green house gases*) dianggap sebagai penyebab perubahan iklim global yang ditakutkan itu. Sektor energi, khususnya kegiatan pembakaran bahan bakar fosil (batubara, minyak bumi, gas bumi) merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca (khususnya karbondioksida, CO₂). Oleh karena itu, sektor ini akan terkena dampak langsung kesepakatan dunia mengenai manajemen perubahan iklim tersebut.

Sebagai sumber energi primer, batubara memegang peranan penting dalam mewujudkan keamanan pasokan energi nasional, karena batubara memberikan kontribusi 33% terhadap konsumsi energi nasional pada 2025. Hal tersebut membuktikan bahwa era minyak bumi akan berakhir dan batubara akan menggantikan peran minyak bumi sebagai energi utama.

Tata kelola pemanfaatannya batubara kini sudah semakin baik. Dengan *Clean Coal Technology* (CCT – teknologi batu bara bersih), membuat batubara semakin prospektif karena kinerja lingkungannya dapat ditingkatkan. Teknologi tersebut mampu mengurangi emisi, mengurangi limbah, dan meningkatkan jumlah energi yang diperoleh dari setiap ton batubara. CCT juga menjadi jawaban atas isu lingkungan



hidup yang selalu melekat pada batubara.

Energi Alternatif

Yang dimaksud energi alternatif disini yaitu sumber energi yang dapat menjadi pengganti minyak bumi yang telah lama dan umum digunakan masyarakat. Karena minyak bumi merupakan barang tambang yang tidak dapat diperbaharui dan jika minyak bumi terus menerus diambil tanpa berusaha mencari penggantinya mungkin dunia akan kehabisan minyak bumi.



Briket Batubara

Batubara

Salah satu sumberdaya alam selain minyak bumi yang tersedia melimpah di Indonesia adalah Batubara. Batubara ini merupakan salah satu sumber energi yang berpotensi dikembangkan menjadi energi alternatif pengganti BBM. Sebagai contoh, pengembangan batubara menjadi energi alternatif ini merupakan suatu peluang tersendiri bagi Kalimantan Timur untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), karena Kalimantan Timur memiliki pasokan batubara yang melimpah.

Beberapa alasan yang mendasari batubara sebagai energi pengganti BBM yaitu ketersediannya melimpah di Indonesia diperkirakan total cadangan mencapai 28,17 milyar ton. Harganya murah tetapi kalorinya sepadan minyak sehingga sangat menghemat biaya produksi untuk skala industri. Pengembangan batubara sebagai energi alternatif harus didorong oleh perusahaan perokayasa engineering yang harus terus berinovasi membuat desain mengubah energi batubara menjadi gas sehingga lebih diminati, dan paling penting ialah rekayasa penanganan limbah dan polusi yang dihasilkan sehingga dapat menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan. (Satyo Naresworo, S.IP)

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

“Bersama untuk Berbagi”

Pada Selasa (28 Feb 2012), Direktur Jenderal Mineral dan Batubara berkesempatan melaksanakan kembali *coffee morning* untuk berbagi informasi dan sumbang pemikiran tentang isu-isu terkini pertambangan. Hadir dalam acara ini para direksi perusahaan pertambangan, ketua asosiasi pertambangan, dan para *stakeholder*. Diantara tamu, hadir pula undangan spesial Dr. Ir. Simon F Sembiring dan Dr. Alexander Sony Keraf. Mereka berdua dikenal sebagai “bidannya” UU No 4/2009. Pakar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir Hikmahanto Juwana juga turut hadir dalam acara *coffee morning* yang ketiga ini.

Dirjen Minerba memaparkan isu-isu strategis sub sektor mineral dan batubara. Apa yang beliau sampaikan diharapkan dapat menepis berita negatif seputar pertambangan. Dirjen Minerba mengajak semua *stakeholder* dan instansi terkait untuk mengingat kembali peran sektor pertambangan dalam mendukung *Four Track Strategy: Pro Job, Pro Poor, Pro Growth, Pro Environment*. Empat strategi yang diamanatkan oleh Presiden RI dan dilanjutkan Menteri ESDM ini dikenal juga dengan *tagline*



“Bersama untuk Berbagi”.

Sepanjang Juli 2011 hingga Januari 2012 berita tentang pertambangan dan tumpang tindih lahan hampir berimbang. Media menyoroti aspek produksi sebanyak 21 persen, seperti *Domestic Market Obligation (DMO)*, peningkatan nilai tambah (PNT), harga mineral dan batubara, serta ekspor. Sedangkan aspek tumpang tindih lahan diberitakan sebanyak 20 persen.

Topik menarik lain yang dibahas pada pagi itu adalah tentang progres rekonsiliasi IUP. Direncanakan, akan ada pengumuman IUP *Clean and Clear* Tahap II. Disamping itu, konflik penggunaan lahan/CSR Rencana Aksi Tindak Lanjut Kajian KPK, Progres Penetapan WP yang hingga saat ini masih konsultasi dengan DPR, DMO, PERMEN ESDM NO.7 TAHUN 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian Mineral, PP No. 9 Tahun 2012 dan Progres renegotiasi.

Dirjen Minerba kembali menjelaskan bahwa di dalam menjalankan tugas dan fungsi selalu berpedoman kepada UU No 4/2009. “Dalam mengemban amanah UU No 4/2009 tersebut kami berusaha bekerjasama dengan instansi terkait lainnya salah satunya adalah dengan KPK untuk menjalankan undang-undang tersebut sebaik-baiknya,” tegasnya.

Penulis: Tim WARTA MINERBA



Peningkatan Peran Sub Sektor Mineral dan Batubara

Dalam Mendukung Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

JAKARTA - Rapat Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berlangsung di Gedung Bidakara ruang Subadra lantai 2. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementerian ESDM, Direktur Sumber Daya Mineral dan Pertambangan BAPPENAS serta seluruh pejabat dan staf dari tiap-tiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (21/12/2011) ini dibuka langsung oleh Bapak Thamrin Sihite selaku Direktur Jenderal yang mengusung tema: **PENINGKATAN PERAN SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.**

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Minerba menyatakan sub sektor mineral dan batubara memiliki peran penting dalam kebijakan pembangunan nasional sesuai tugas yang diamanatkan presiden melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupa *Four Track Strategy*. Pertama, **Pro Growth** dalam sub sektor mineral dan batubara dapat berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi yang termasuk di dalamnya penerimaan negara, investasi, peningkatan nilai tambah dan neraca perdagangan (baik produksi, ekspor dan domestik). Kedua, **Pro Job** dalam sub sektor mineral dan batubara terkait dengan ketenagakerjaan dan mengutamakan penggunaan produk lokal (*local content*). Ketiga, **Pro Poor** dalam sub sektor mineral dan batubara diimplementasikan sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR), tanggung jawab perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, **Pro Environment** dalam sub sektor mineral dan batubara diaplikasikan dengan penerapan *Good Mining Practice*, reklamasi dan pascatambang dalam kegiatan pertambangan.

Pada rapat kerja ini ditekankan pula pentingnya peran sektor pertambangan mineral dan batubara sebagai salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional. Peran penting sektor pertambangan pada 2011 tercermin melalui: penerimaan negara dari pertambangan umum yang terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari royalti,

penjualan hasil tambang dan iuran tetap. Selain dari penerimaan negara, sektor pertambangan berperan dalam pembangunan daerah melalui dana bagi hasil untuk pemerintah daerah dan dana pengembangan masyarakat. Masyarakat sekitar tambang mendapat manfaat dengan adanya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana. Selanjutnya, penanaman investasi di bidang pertambangan akan menggerakkan pula kegiatan perekonomian. Sektor pertambangan juga menyediakan sumber energi batubara untuk pembangkit listrik dan industri. Dan yang tidak kalah penting, sektor pertambangan menyerap tenaga kerja bagi kegiatan pertambangan dan industri pendukungnya.

Pada rapat kerja ini dilakukan pula evaluasi beberapa program dan kegiatan tahun 2011 yang dilaksanakan oleh masing-masing unit di lingkungan Ditjen Minerba. Berbagai permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2011 sudah seharusnya diinventarisir dan dipecahkan bersama sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya dapat dioptimalkan. Beberapa tujuan yang diharapkan dalam rapat kerja yaitu evaluasi program dan kegiatan, inventarisasi permasalahan dan kendala pelaksanaan program, sinkronisasi program dan kegiatan, perumusan dan strategi pencapaian target prioritas tahun 2012 serta upaya peningkatan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Ringkasan Liputan Warta 2012

PT Adaro Indonesia

Sustainability dengan Sinergi Profit, People and Planet

Tim Minerba

NAMA PT Adaro Indonesia sudah tidak asing lagi dalam dunia pertambangan. PT Adaro Indonesia telah memproduksi batubara dengan merek dagang *Envirocoal* (batubara ramah lingkungan) sejak 1992.

Tim Redaksi Warta beranjak dari Bandara Internasional Soekarno Hatta pada pagi hari dan mendarat di Bandar Udara Syamsuddin Noor, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kami menuju bandara Warukin Kabupaten Tabalong dengan menggunakan pesawat Airfast. Bandara Warukin adalah bandara kecil yang dikelola oleh Pemkab Tabalong dan PT Adaro Indonesia. Sesampainya di sana langsung dipandu menuju site PT Adaro Indonesia.

Batubara Ramah Lingkungan

PT Adaro Indonesia adalah pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi I yang telah memproduksi batubara dengan merek dagang *Envirocoal*. Sesuai namanya, produk batubara ramah lingkungan tersebut hanya memiliki kandungan belerang 0,1 persen dan kadar abu sekitar 1 persen. Pengguna utama batubara PT Adaro Indonesia adalah perusahaan pembangkit tenaga listrik, industri semen, serta industri pulp dan kertas. Khusus di Indonesia, produk batubaranya digunakan untuk PLTU di Jaringan Jawa-Bali, yaitu PLTU PEC, PLTU



Paiton 1 dan 2, PLTU Jawa Power, PLTU Cilacap dan PLTU Suralaya.

PT Adaro Indonesia adalah anak perusahaan PT Adaro Energy, Tbk. PT Adaro Indonesia memiliki kantor pusat di DKI Jakarta dan memiliki tiga lokasi wilayah penambangan, yaitu Tutupan, Paringin dan Wara. Tutupan memiliki cadangan terbesar dibandingkan dengan dua blok lainnya dan mulai dioperasikan pada 1997. Sementara blok Paringin, adalah blok pertama yang dioperasikan Adaro serta menjadi cikal bakal lahirnya PT Adaro Indonesia.

Tempat penumpukan batubara (*crushing plant*) beserta pelabuhan muat terletak di Kabupaten Barito Selatan di Kalimantan Tengah atau tepatnya di Pelabuhan Muat Kelanis. Pelabuhan ini menjadi salah satu terminal sungai terbesar di dunia. Pelabuhan memiliki kapasitas muat batubara lebih dari 50 juta ton. Dilengkapi 7 *crusher* dengan total kapasitas 7.500 ton/jam. Kapasitas *stockpile* masing-masing sebesar 250.000 ton dan terdapat kapasitas pemuatan tongkang, dua sistem *load out conveyor* masing-masing berkapasitas 5000 ton per jam.

Batubara subbituminous (“envirocoal”) merupakan operasional tambang batubara tunggal terbesar di belahan bumi bagian selatan, terintegrasi *vertical* dari *pit to port*. PT Adaro Indonesia bertahan sebagai salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia dan berada di posisi lima eksportir terbesar untuk pasar global batubara termal *seaborne*.

Adaro dan Kepedulianya

Setelah melihat langsung *site*utupan PT Adaro Indonesia, selanjutnya kami melihat program-program yang ada di PT Adaro Indonesia. PT Adaro Indonesia menjalankan prinsip untuk mencapai aspek keberlanjutan usaha dan operasi perusahaan, pertumbuhan saja tidak cukup tanpa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Karena itu PT Adaro Indonesia bertekad menggapai keuntungan (*profit*) dengan mengedepankan kesejahteraan sosial (*people*) dan kelestarian lingkungan (*planet*). Ini adalah konsep dasar dari keberlanjutan (*sustainability*). Prinsip *people*, *profit* dan *planet* ini adalah prinsip *triple bottom line*.

Profit

Pencapaian ekonomi PT Adaro Indonesia menjadi indikator utama keberhasilan dalam mempertahankan dan mengembangkan pertumbuhan. Prinsip inilah yang menjadi landasan PT Adaro Indonesia dalam mengukur kinerja ekonomi. Keberadaan perusahaan secara langsung maupun tak langsung memberikan pengaruh pada perekonomian lokal, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun kontribusi pada pendapatan daerah melalui penerimaan negara. Selain itu kontribusi perusahaan pada perekonomian nasional juga diwujudkan dengan kebijakan keberpihakan pada pemasok lokal untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Kebijakan menggunakan pemasok lokal dibarengi pula dengan mekanisme pemberlakuan kontrak kerja, disertai pengawasan ketat. Selain itu, PT Adaro Indonesia menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha yang sehat dan menolak segala bentuk tindakan yang mengarah pada antikompetisi maupun praktik monopoli. Pencapaian perusahaan sebagai salah satu produsen terbesar di Indonesia

tidak terlepas dari semangat bersaing yang positif dengan mengedepankan keunggulan produk yang tidak dimiliki perusahaan pertambangan batubara lainnya. Dalam meningkatkan kinerja ekonomi, PT Adaro Indonesia sebagai perusahaan yang berlokasi dan menjalankan usaha di Indonesia, tunduk dan patuh dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Planet

Program kedua adalah bagaimana PT Adaro Indonesia dapat menjalankan prinsip kelestarian lingkungan (*Planet*). Industri pertambangan adalah industri yang memiliki karakteristik unik karena industri ini selalu dikaitkan dengan aktivitas mengubah bentang alam. Dengan begitu perlu penanganan lingkungan yang tepat. Salah satu program terbesar dalam kegiatan pertambangan adalah penghijauan kembali tambang menjadi hutan. Perusahaan menelurkan banyak program untuk membenahi lahan bekas tambangnya dan disesuaikan dengan peruntukannya.

PT Adaro Indonesia berkomitmen melakukan penambangan dengan bertanggungjawab dan berupaya dengan optimal mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Program lingkungan yang dilakukan diantaranya adalah reklamasi pengelolaan air dan upaya konservasi sumberdaya air serta pemanfaatan energi *alternative*.

Dalam hal penataan kembali lahan bekas tambang, PT Adaro Indonesia mempertimbangkan berbagai aspek penting antara lain penataan sesuai dengan peruntukan lahan dan mempertimbangkan potensi yang tepat untuk masyarakat sekitar. Tahapan reklamasi yang dilakukan yaitu penataan lahan, pengendalian erosi & sedimentasi, revegetasi atau penanaman dan pemeliharaan tanaman. Untuk mendukung kegiatan reklamasi PT Adaro Indonesia memiliki pusat pembibitan yang berkapasitas 120.000 bibit. Saat ini pusat pembibitan yang dimiliki PT Adaro Indonesia mencapai 2 Ha dengan kapasitas 30.000–40.000 bibit/bulan. Berikut program yang dilakukan sebagai bagian reklamasi, yaitu:

1. Pembangunan Model Hutan

Rehabilitasi areal bekas tambang melalui kegiatan reklamasi lahan dan revegetasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan bekas tambang. Dalam prosesnya kegiatan revegetasi dapat meningkatkan perbaikan lahan dengan memberikan input berupa guguran serasah daun atau bagian tanaman lainnya ke tanah dan menciptakan kondisi iklim mikro yang dapat meningkatkan aktivitas mikroba tanah.

Saat ini PT Adaro Indonesia telah bekerja sama dengan Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Banjarbaru untuk membuat suatu model hutan di lahan bekas tambang. Kegiatan pengayaan tanaman ini bertujuan untuk mengumpulkan jenis-jenis tanaman khas Kalimantan yang nantinya dikembangkan untuk membuat model hutan reklamasi. Lokasi yang dipilih Hutan Paringin karena kondisi hutan yang rimbun tanaman tersebut. Beberapa pohon yang diteliti termasuk jenis yang sudah jarang ditemukan di wilayah tersebut, seperti pohon ulin, tengkawang, rantau, baur, keminting dan kapur.

Dari tinjauan lapangan menunjukkan, tingkat pertumbuhan semua petak tanaman di Paringin terlihat sudah stagnan, tetapi dari aspek penutupan lahan sudah melewati fase maksimal dan sudah menuju fase penurunan yang ditandai dengan sudah banyaknya batang-batang bagian atas pohon yang mengalami patah-patah dan pelapukan. Kejadian ini terjadi pada semua jenis tanaman dari kelompok pohon pioner awal seperti jenis-jenis akasia, sengon, ekaliptus, gamal dan melina.

2. Pemanfaatan air bekas galian tambang batubara untuk budidaya udang galah dan ikan nila



Sejak penambangan batubara pada 1997, di site Paringin terbentuk kolam seluas 15,16 Ha dengan daerah tangkapan 168,80 Ha. Setelah pascapenambangan dilakukan reklamasi yang membentuk kawasan hutan baru di sekitar kolam dan di kawasan daerah tangkapan yang menyebabkan terjadinya perbaikan kualitas air dari waktu ke waktu sehingga memiliki potensi untuk dimanfaatkan di bidang perikanan, berupa ikan nila BEST dan udang galah.

Saat ini PT Adaro Indonesia telah bekerja sama dengan LIPI untuk membuktikan air bekas galian tambang tersebut memiliki potensi untuk dimanfaatkan di bidang perikanan. Dengan harapan dari kerjasama ini dapat memberikan sesuatu yang terbaik kepada masyarakat sekitar tambang sebagai salah satu program pengembangan masyarakat dan pascatambang melalui usaha perikanan. Ikan nila BEST (*Bogor Enhanced Strain Tilapia*) merupakan ikan hasil pemuliaan menggunakan dengan karakter keunggulan dalam pertumbuhan. Nilai BEST memiliki banyak keunggulan dibandingkan jenis nila yang ada di masyarakat, seperti ketahanan terhadap penyakit, pertumbuhan yang cepat, daya adaptasi lingkungan yang tinggi dan kemudahan mendapatkan indukan.

3. Konservasi Sumber Daya Air melalui Water Treatment Plant (WTP) T-300

Sumber daya air tambang yang melimpah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan di tambang Adaro baik di Tutupan, Wara maupun Paringin dikelola dan dimanfaatkan PT Adaro Indonesia sebaik mungkin. Inovasi dan penyempurnaan pengelolaan air tambang kearah yang lebih modern dan terukur terus dilakukan PT Adaro Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik dan benar, sistem pengelolaan air limbah PT Adaro Indonesia di nilai merupakan salah satu yang terbaik diantara perusahaan tambang lainnya.

Selain itu pengelolaan air tambang dilakukan



PT Adaro Indonesia untuk menghasilkan air yang sesuai dengan standar baku mutu lingkungan sehingga aman untuk dilepas ke perairan penduduk. Namun, tidak hanya inovasi dalam sistem pengelolaan air limbah tambang, air tambang yang telah dikelola ditingkatkan lagi agar memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi lingkungan dan juga masyarakat.

Saat ini WTP T-300 mampu memproduksi air sebanyak sebanyak 20 liter/detik dan akan ditingkatkan menjadi 200 liter/detik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini air bersih telah didistribusikan melalui sistem pipanisasi yang dibangun PT Adaro Indonesia sepanjang 10 km dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat setidaknya di 5 desa, serta internal PT Adaro Indonesia. Program air bersih untuk masyarakat ini merupakan komitmen yang terintegrasi untuk lingkungan dan masyarakat.

4. Proyek uji coba “Pilot” Pengembangan Biodiesel

Dilatarbelakangi upaya perusahaan untuk mendukung program pemerintah dalam

Pabrik biodiesel ini telah diresmikan pada 31 Mei 2011 oleh Menteri ESDM, Dirjen Mineral dan Batubara, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Gubernur Kalimantan Selatan dan juga jajaran direksi PT Adaro Energy, Tbk, Komatsu dan United Tractors.

Pilot project pabrik biodiesel ini mengukuhkan PT Adaro Indonesia sebagai perusahaan batubara yang pertama kali melakukan terobosan sebagai komitmen mendukung penggunaan energi alternatif. Biodiesel fuel merupakan bahan bakar ramah lingkungan yang dihasilkan dari tanaman jarak maupun tanaman *feedstock* lainnya, seperti kelapa sawit. Saat ini biodiesel baru diaplikasikan pada beberapa unit *dump truck*. Pada 2012, akan dilakukan evaluasi studi kelayakan untuk persiapan pengembangan lebih lanjut yang meliputi kinerja loading terhadap kebutuhan bahan bakar, kinerja mesin, biaya produksi B20 terhadap harga solar, produktivitas pabrik, keterampilan tenaga kerja dan ketersediaan bahan baku (tanaman jarak) dengan pengembangan penanaman jarak di lahan masyarakat melalui program CSR dan lahan adaro yang nantinya dapat mendukung produksi bahan baku lokal untuk konsumsi lokal PT Adaro Indonesia.



penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan. Pada 2009, PT Adaro Energy, Tbk yang merupakan induk perusahaan PT Adaro Indonesia bekerjasama dengan Komatsu dan United Tractors melakukan terobosan dalam konservasi energi dengan membangun *pilot project* pabrik pengolahan biodiesel yang berlokasi di wilayah operasional PT Adaro Indonesia, Tanjung, Kalimantan Selatan dengan kapasitas 1,1 ton per hari.

People

Batubara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan yang harus dikelola dan digunakan secara bijaksana dan efisien untuk menciptakan manfaat yang optimal bagi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar area maupun yang berdekatan dengan wilayah operasi. Dengan memperjuangkan prinsip saling menghormati, kemitraan dan komitmen

jangka panjang dan berkesinambungan, kegiatan CSR PT Adaro yang difokuskan pada empat bidang: ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Program CSR tersebut mencakup enam Kabupaten di dua Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah dengan mempertimbangkan potensi masing-masing daerah.

Beberapa program yang telah berjalan dan telah di evaluasi antara lain:

1. Microfinance

Sebagai Upaya Pencitraan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) sebagai lembaga keuangan mikro yang dibentuk, dengan indikator perkembangan "sangat pesat." Hal ini merupakan usaha kecil menengah yang merupakan salah satu target dalam program pemberdayaan masyarakat di sekitar PT Adaro Indonesia. Pembinaan dan pengembangan usaha bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta membentuk masyarakat mandiri secara ekonomi dan manajemen. LKM Banua Bauntung merupakan akses permodalan dengan mudah untuk para pengusaha kecil. LKM ini didirikan di Tanjung kabupaten Tabalong sejak tahun 2005, kini telah memiliki 3 cabang yang berlokasi di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur, Buntok Kabupaten Bariot Selatan dan Paringin kabupaten Balangan. Keberhasilan PT Adaro membina LKM ini terlihat hingga Desember 2011, LKM telah menyalurkan dana sebesar Rp. 49.2 miliar kepada 26.344 nasabah baik yang masih aktif maupun yang telah lunas pembayaran.

Sementara untuk jangka panjang, kehadiran lembaga yang menjadi payung hukum *Microfinance* perlu mendapat perhatian sebagaimana halnya lembaga perkreditan untuk melayani kelompok menengah atas.

2. UKM Madu "Tiga Wanyi"

Dari "pinggiran hingga berkelas" mungkin itu adalah slogan yang pas untuk UKM Madu ini, karena asalnya penjual madu pinggiran jalan. Proses pengolahan madu Tanjung milik H. Amidan cukup sederhana. Madu alam cukup diperas dan disaring, lalu dikemas secara sederhana dalam botol plastik. Beruntung keberadaan dan potensi madu alam Haji Imrani terdengar Lembaga Pengembangan Bisnis

(LPB) yang dibentuk tim CSR PT Adaro Indonesia. LPB ini memang dibentuk untuk membina Usaha Mikro Kecil (UKM) yang potensial yang ada di wilayah operasional PT Adaro Indonesia. LPB Melihat, madu dengan kualitas yang baik ini bisa dijadikan produk unggulan Kabupaten Tabalong.

Usaha keluarga yang sudah berdiri sejak tahun 1981 ini diawali oleh upaya yang gigih dari pasangan suami istri Bapak Haji Hamidan dan Ibu Hajah Yohana. Mereka selalu terjun langsung keluar masuk hutan untuk mencari sarang lebah liar demi menghidupi keluarganya. Berkat kegigihan pasangan suami istri ini mereka meraih keberhasilan yang gemilang dalam usahanya serta dalam membina rumah tangganya. Usaha ini merupakan usaha turun temurun yang kini di kelola oleh putranya Arif Rahman. Pada kesempatan ini Tim Warta Minerba juga dapat langsung mencicipi madu asli yang tersedia di gerai madu UD. Tiga Wanyi, memang rasanya lebih enak dan kental dan beraroma bunga hutan, sambil mencicipi madu asli tersebut Tim Warta juga menayakan perihal nama dari "Tiga Wanyi" kira kira apa ya artinya? Ternyata Bapak Hamidah ini suka dengan angka tiga, angka ganjil, sehingga di beri nama Tiga Wanyi, sedangkan Wanyi adalah nama lebah penghasil madu itu.

Mendapat kesempatan permodalan dari LKM Banua Bauntung dan mendapat apresiasi dari Kementerian Koordinator kesejahteraan rakyat dan Kemenerian Sosial berupa penghargaan pada Desember 2011 meraih peringkat "SILVER" dalam Indonesian CSR Awards "ICA" 2011 dari Kementerian Sosial dan *Corporate Forum For Community Development*.

3. Pembibitan ikan "Makmur Jaya"

Bagi masyarakat yang tinggal di tepi Sungai Barito, budidaya ikan adalah tabungan yang dapat dipanen sewaktu-waktu ketika dibutuhkan, dan sajian spesial bagi tamu-tamu istimewa. Pakan ikan pun didapat dari sisa-sisa ikan tangkapan yang tidak laku dijual atau sisa-sisa makanan.

Hal ini semakin berkembang setelah masuknya perusahaan tambang yang peduli masyarakat sekitar ini menjadi pembina dan pengawas. Tim warta minerba diberikan kesempatan melihat hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat khususnya pembibitan ikan "Makmur Jaya" Tajudin yang



Alat pengolah madu bantuan PT Adaro



Tim Warta Minerba bersama perwakilan PT Adaro dengan Bapak Hamidan dan Ibu Yohana

berlokasi di Desa Kambitin, kabupaten Tabalong.

Aktivitas pembibitan, budidaya ikan dengan pembesaran bibit dan pemancingan umum. Jumlah kolam ikan yang dikelola dengan usaha berkelompok ini kian berkembang. Adaro membantu dengan memberikan pelatihan sebagai pembinaan pengelolaan usaha, bantuan modal bergulir melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM), pembinaan pembibitan dan penanganan penyakit dari dinas perikanan serta bantuan infrastruktur.

4. Kelompok “Karet Unggul” dan Pengasapannya

Pengembangan Kebun Karet Unggul Potensi tanaman karet di wilayah operasional PT Adaro Indonesia sangat besar. Penanaman pohon karet dilakukan dalam rangka memanfaatkan lahan kosong dan mengganti kebun karet yang tidak produktif lagi menjadi kebun karet unggul. Kepada para petani karet, Adaro memberikan bantuan berupa bibit serta pelatihan dudidaya dan pasca panen tanaman karet serta peningkatan mutu hasil

melalui pengelolaan rumah pengasapan karet.

Perkembangan 3 tahun terakhir sejak 2007 sampai dengan 2009 cukup signifikan. Total lahan binaan ditahun 2007 adalah 1.905 ha dengan jumlah petani binaan sebanyak 2.140 orang. Kini meningkat menjadi 4.350 ha dengan 4.849 orang jumlah petani binaan pada akhir 2009, hingga 2011 jumlah petani binaan menjadi 7.175 petani. Pengembangan kebun karet unggul dilakukan di 3 kabupaten yaitu: Tabalong, Balangan dan Barito Timur.

Untuk meningkatkan nilai jual dan pendapatan para petani karet, Adaro membuat rumah pengasapan karet, dengan memberi pelatihan dinamika kelompok, pelatihan usaha tani pasca panen dan pelatihan menghitung kadar karet kering. Saat ini telah didirikan lima rumah pengasapan karet yang berada di Kabupaten Balangan yaitu di desa Babayau dan Tamiyang, 2 di Kabupaten Tabalong yang berada di desa Balida dan Banyu Tajun serta 1 rumah pengasapan di Desa Warukin.





5. Rumah Belajar Saraba Kawa

Didirikan pada tahun 2012 kerjasama antara PT Adaro Indonesia dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Rumah belajar ini memiliki kegiatan diantaranya: rumah buku, rumah multimedia, rumah kreatif, rumah apresiasi dan rumah peduli. Hingga saat ini rumah belajar telah mencapai lebih dari 800 orang yang terdiri dari siswa SD- SLTA, mahasiswa, pekerja serta kelompok rentan atau anak putus sekolah.

Sebagai bentuk kemandirian rumah belajar "Saraba Kawa" membentuk unit usaha diantaranya; pusaka *café netbook*, loket pembayaran listrik dan telpon secara *online*, membuat kerajinan daur ulang dari sampah untuk kemudian dipasarkan dan lainnya. Program ini mendapatkan penghargaan *Gold* dari Kementerian Sosial.

Setelah singgah di Rumah Rumah Belajar Saraba Kawa, Tim Warta MINERBA diajak untuk melihat Sanggar Tari Suluh Banua yang bertempat

di OR Pembataan, Murung Pudak atau Komplek Pendopo Bersinar Kabupaten Tabalong. Tujuan untuk membuka sebuah sanggar seni tari dengan harapan anak-anak muda lebih menyukai dan menghargai budaya lokal terutama tarian Banjar baik tarian Banjar klasik maupun tarian Banjar kreasi. Sanggar Tari ini didirikan atas prakarsa beberapa orang dengan dasar pertimbangan seperti di atas, dan merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang seni budaya, didirikan atas prakarsa Irna Purwanti, SE, Mairiansyah, Dedy Rahnoni, S.Pi, dan Kamrani, S.Pd.

Sanggar Tari ini cikal bakalnya berdiri pada tanggal 3 Pebruari 2009 di Tanjung Kabupaten Tabalong yang semula bernama Pusaka Bersinar, kemudian mengalami perubahan nama pada tahun 2011 tepatnya pada tanggal 27 Maret 2011 menjadi SULUH BANUA dengan tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya tradisional Banjar.



Daftar Penghargaan CSR dan Lingkungan PT Adaro Indonesia Tahun 2011

Lingkungan

Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi dari Kementerian ESDM. Peringkat Aditama dengan nilai tertinggi (emas) untuk sektor pertambangan batubara

PROPER Peringkat hijau kinerja tahun 2010-2011 dari Kementerian Lingkungan Hidup RI

Penghargaan sebagai perusahaan yang berperan aktif mensukseskan program pemerintah penanaman 1 milyar pohon dari Kementerian Kehutanan RI

K3

Peringkat PRATAMA untuk keselamatan pertambangan dari Dirjen Minerba

Kinerja Korporasi

PRIMANIYARTA 2011 dari Kementerian Perdagangan kategori Eksportir Berkinerja

CSR

a. **Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) Award dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat**

Peringkat *Gold* – Kategori *Ensure Environmental Sustainability*, Program Penciptaan Akses Air Minum / Bersih dan Sanitasi Lingkungan

Peringkat *Gold* – Kategori *Reduce Child Mortality*, Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita (Mengurangi gizi buruk, imunisasi, taman bacaan anak, penerangan/sosialisasi kesehatan anak, bantuan pembangunan posyandu, poskesdes, pustu, puskesmas)

Peringkat *Silver* – Kategori *Improve Maternal Health*, Program Partisipasi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan

b. **Indonesian CSR Award (ICA) 2011 dari Kementerian Sosial**

Peringkat *Platinum* – Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat

Peringkat *Platinum* – Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat

Peringkat *Gold* – Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat

Peringkat *Gold* – Bidang Pembelajaran Ekonomi Masyarakat

Peringkat *Silver* – Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Peringkat *Silver* – Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Peringkat *Silver* – Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Peringkat *Silver* – Bidang Lingkungan

c. **Asia Responsible Entrepreneurship Award – South East Asia (AREA – SEA) 2011 kategori Health Promotion Award dari Enterprise Asia, organisasi non profit yang berpusat di Malaysia dan terdaftar di Hongkong.**

Koordinasi Pelaksanaan Permen 7/2012



Selasa, 10 April 2012 menjadi hari yang cukup sibuk bagi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hari ini Ditjen Minerba berkesempatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Permen 7/2012 Dengan gubernur Provinsi Seluruh Indonesia. Acara yang dimulai dengan laporan panitia oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral.

Dalam kesempatan ini acara yang dihadiri oleh Simon FX Sembiring, Riyad Khoiril (Staf Khusus KemenLH), Prof. Dr. Ir Hikmahanto Juwana, S. Witoro Soelarno, Herman Afif (masyarakat tambang).

Acara yang berlangsung selama dua hari dengan pembagian sesi presentasi sebagai berikut:

Hari Selasa, 10 April 2012 dilakukan pemaparan dari gubernur/perwakilan dalam empat sesi, yaitu: Sesi I: Provinsi NAD, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu; Sesi II: Provinsi Riau, Provinsi Kep. Riau, Provinsi Kep. Bangka Belitung, Prov Sumatera Selatan, Prov Lampung; Sesi III: Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan; Sesi IV: Prov Banten, Prov Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DI. Yogyakarta.

Hari Rabu, 11 April 2012 dilakukan pemaparan dari gubernur/perwakilan dalam dua sesi, yaitu:

Sesi V: Provinsi NTT, Provinsi NTB, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat; Sesi VI: Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Presentasi perwakilan daerah terus berlangsung hingga sore hari selasa, 10 April 2012 di Lantai 5 Gedung Diten Minerba. Rapat koordinasi yang bertujuan untuk menginventarisasi data

sumberdaya dan cadangan, tingkat produksi, rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dan rencana penjualan komoditas mineral dari masing-masing Propinsi, serta melakukan pembahasan terkait pelaksanaan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012, dan mengusung tema "**Koordinasi untuk Kemakmuran Rakyat Indonesia**" ini mendapat tanggapan yang positif dari daerah. Hal ini ditunjukkan dengan antusiasnya Perwakilan daerah untuk dapat memaparkan potensi sumber daya mineral, dan semua aspek perusahaan yang dilakukan meliputi kendala dan permasalahan yang dihadapi untuk dapat bersinergi melak-sanakan amanat Permen ESDM tersebut. Dalam sesi I - IV beberapa pejabat ESDM yang ikut andil dalam acara ini dan berkenan menjadi moderator diantaranya Ir. Thobrani Alwi, MM; Dr. Marwansyah Lobo Balia, MSc; Ir. Syawaludin Lubis, MT dan Drs. Edi Prasodjo, MSc.

Pada intinya Pihak Pemerintah Daerah yang hadir setuju dengan amanah dari Permen ESDM No.7 Tahun 2012. Satu suara di serukan bahwa setiap propinsi mengharapkan agar peran Gubernur sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dapat ditingkatkan dalam kegiatan pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan di masing-masing propinsi.

Pihak Pemerintah Daerah setuju dengan amanah dari Permen ESDM No. 7 Tahun 2012 untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Pemerintah Daerah setuju bahwa pembangunan pabrik pengolahan pemurnian tidak perlu berdekatan dengan lokasi IUP Operasi Produksi, untuk kemudian diatur melalui mekanisme kerjasama antara pengusaha pabrik pengolahan pemurnian dengan IUP Operasi Produksi. (Tim WARTA MINERBA)

Keikutsertaan Pameran

Jambi Emas Expo 2012

9 - 14 Februari 2012

Pameran Jambi Emas Expo 2012 terselenggara atas kerjasama Tetra Communication bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Pameran diselenggarakan dalam rangkaian Hari Pers Nasional ke 27, dimana Provinsi Jambi ditunjuk sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional ke 27 tahun 2012. Pameran berlangsung pada tanggal 9 - 14 Februari 2012 mengambil tempat di Taman Rimba Palmerah Kota Jambi.

Penanggung jawab atau Ketua Panitia Jambi Emas Expo 2012 A. Shomad yang juga Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Jambi, mengatakan tidak kurang dari 163 UKM dan 105 diluar UKM yang menempati areal seluas 2.400 meter persegi. Pameran ini merupakan sebagai media promosi dan transaksi bisnis, baik antar pelaku usaha, maupun bagi masyarakat luas, yang

diharapkan memiliki multiplier effect bagi gerakan perekonomian daerah.

Sedangkan Ketua PWI Pusat H. Margiono mengatakan bahwa pameran ini dapat dijadikan sarana informasi dan promosi yang efektif dan strategi dalam menampilkan aneka perkembangan teknologi media nasional dan potensi investasi dan unggulan daerah, yang mencakup bidang layanan public, pertambangan, industry, perkebunan, hasil kelautan dan perikanan, wisata dan budaya serta produk unggulan koperasi dan UKM. Baik binaan BUMN maupun perorangan. Disamping itu dalam pameran



ini dapat diperlihatkan hasil kemajuan pembangunan dan inovasi produk daerah yang telah dicapai, sedangkan bagi masyarakat pers, kegiatan ini dapat dijadikan ajang sarana edukasi sosialisasi produk pers dan teknologi media serta entry point dalam mencari solusi atas permasalahan pers di daerah maupun nasional. (Sutarman, SE)



Keikutsertaan Pameran

KALTIM FAIR 2012

Samarinda 29 Maret – 4 April 2012



Pada 29 Maret 2012, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Farid Wadjdy, membuka Pameran Kaltim Fair 2012. Acara yang digelar di Area Stadion Sempaja



Samarinda ini berlangsung dari 29 Maret hingga 4 April 2012.

“Perekonomian Kaltim secara umum membaik,” serunya ketika membuka pameran tersebut. Hal itu ditandai dengan meningkatnya minat investasi di Kaltim. Total nilai investasi pada 2011 tercatat Rp. 28,32 triliun. Angka ini jauh melampaui target semula yang hanya Rp. 20 triliun.

la menekankan, salah satu indikator membaiknya perekonomian Kaltim adalah

meningkatnya minat investasi asing dan domestik. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah yang memberikan kemudahan dalam perizinan dan pelayanan umum.

Pembukaan Kaltim Fair 2012 terbilang istimewa, karena dihadiri oleh Duta Besar Bosnia Herzegovina untuk Indonesia, Fuad Sabeta dan Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Edy Hariyadi. Tidak kurang dari 190 stan turut meramaikan Kaltim Fair 2012



ini. Peserta pameran berasal dari BUMN, BUMD, beberapa instansi pemerintah pusat dan daerah dari berbagai provinsi.

Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim, H. Yadi Sabian Noor yang dipercaya sebagai Ketua Pelaksana Kaltim Fair 2012, menjelaskan gelaran Kaltim Fair 2012 bertujuan sebagai sarana memamerkan berbagai hasil pembangunan yang dicapai, peluang dan potensi serta menampilkan produk-

produk unggulan daerah. Event ini juga sangat baik untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui UKM. Kaltim Fair 2012 ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT Provinsi Kaltim ke-55 yang menampilkan laporan dan berbagai keberhasilan pembangunan di Kaltim.

Selesai acara pembukaan, Wakil Gubernur Kaltim Bapak Farid Wadjdy didampingi Duta Besar Bosnia Herzegovina langsung melakukan peninjauan ke sejumlah stan.

Menjadi sebuah kehormatan, karena stan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tidak luput dari perhatian Wagub yang berkesempatan meninjau dan bersilaturahmi dengan pada petugas stan. (Sutarman, SE)



Tambang dan Perkebunan Sama-sama Penting!

Disuatu pagi hari Dino sedang duduk termenung di bale-bale yang berada di kebun kelapa sawit yang sangat luas milik Pak Kumalkumuludin seorang jawara di kampungnya.

Kali ini Dino tidak sembarangan termenung dan melamun. Ia menatap luas area perkebunan tersebut sambil bergumam "Ooohh.. betapa banyak jasa kebun ini karena hasilnya sudah membawa manfaat banyak."

Sambil bergumam, Dino membayangkan bagaimana seandainya kebun yang luas ini mengandung komoditi tambang? Pasti kendaraan berat akan berseliweran setiap hari dan mengubah kebun hijau itu menjadi kawasan pertambangan nan gersang. Membayangkan gersang, tenggorkan Dino langsung terserang haus dan ia bergegas lari menuju rumah Mino. Pepatah bilang "sambil menyelam minum air", kali ini Dino punya modifikasi pepatah itu "Sambil minta minum, diskusi mengalir". Rasanya tak puas jika lintasan pikirannya itu tak didiskusikan dengan Mino. Sobatnya yang dalam kacamata Dino, Mino mahfum betul urusan tambang.

"Minoooo..., Minooo..... !!" teriak Dino keras. Mino yang sedang termenung menatap sekelompok awan merasa terganggu. "Eh lu lagi Din pagi-pagi dah teriak-teriak aja, kayak ayam jantan, ada apa sih?"

"Gini Min, gw lagi ngebayangin gimana ya kalau ternyata di kebun pak Kumaluddin ada bahan tambang?"

"Lalu?" tanya Mino tak sabar.

"Lalu, perusahaan tambang mengambil alih lahannya dan beroperasi di sana. Gimana nasib pohon-pohon hijau itu ya?"

"Lahhh...kok bisa berpikiran gitu lu Din?" sahut Mino yang

tengah heran karena ada makhluk yang punya pertanyaan seperti itu di pagi hari.

"Iya Mino, di areal perkebunan kan bisa saja ada komoditi tambangnya, nah... ini bagaimana aturannya?" Dino menjelaskan maksud pertanyaannya. "Siapa yang harus mengalah?" tanyanya lagi.

"Ooh.. itu sudah ada aturannya Min," jawab Dino yakin. Pertambangan dilakukan untuk mengambil bahan tambang yang ada di bawah tanah. Bahan tambang yang dimaksud adalah kekayaan negara yang pengusahaannya dipercayakan kepada yang memegang izin (KP/IUP). Sesuai UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 134 s/d 137 menyebutkan, "*perusahaan pertambangan harus menyelesaikannya terlebih dulu dengan pemegang hak atas tanah pada daerah yang akan dikerjakan, yang pelaksanaannya dapat dilakukan bertahap sesuai kebutuhan.*" Kemudian pada PP 23 Tahun 2010 pasal 100 ayat (1) dan (2) diatur juga mengenai penyelesaian kompensasi melalui sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai.

"Diluar skenario tersebut tentunya tidak sesuai dengan peraturan perundangan Din," imbuah Mino. Jadi kebanyakan kasus tumpang tindih pemegang izin pertambangan dan pengguna lahan permukaan seperti kehutanan, perkebunan, pertanian, memang hampir tidak bisa dihindarkan.

"Iya juga sih Min, jadi kalo diliat-liat kegiatan perkebunan itu penting, dan kegiatan pertambangan juga penting, jadi sama-sama penting kan?" Karena dua-duanya berpotensi memberikan kontribusi positif dalam pembangunan. Jadi memang harusnya ada musyawarah ya kalo kejadiannya kayak gitu, seharusnya salah satu kegiatan tersebut tidak boleh meniadakan yang lain ya Min."

"Nah..., makin cerdas menyimpulkan lo Din," sambung Mino sambil menyuguhkan secangkir kopi untuk Dino.



Mana yang Lebih Penting, antara Tambang dan Perkebunan?



Sesuai UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 134 s/d 137 menyebutkan bahwa perusahaan pertambangan harus menyelesaikannya terlebih dulu dengan pemegang hak atas tanah pada daerah yang akan dikerjakan, yang pelaksanaannya dapat dilakukan bertahap sesuai kebutuhan. Kemudian pada PP 23 Tahun 2010 pasal 100 ayat (1) dan (2) diatur mengenai penyelesaian kompensasi melalui sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai. Diluar skenario tersebut tentunya tidak sesuai dengan peraturan perundangan.



DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 10, Jakarta 12870 - Indonesia

Telp: +62-21 8295608; Fax: +62-21 8315209, 8353361

www.djmbp.esdm.go.id

E-mail: wartamp@djmbp.esdm.go.id